

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 2



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak
Media Online	Tribun News Jateng

Wilayah: Kabupaten Blora

Lagi, Pemkab Blora Raih Opini WTP Ke 8 Atas LKPD 2021 dari BPK RI

<https://jateng.tribunnews.com/2022/04/28/lagi-pemkab-blora-raih-opini-wtp-ke-8-atas-lkpd-2021-dari-bpk-ri?page=all>

TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Lagi, Pemerintah Kabupaten Blora kembali meraih penghargaan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kedelapan kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021.

Ketua BPK RI Perwakilan Jateng, Ayub Amali, mengatakan Pemkab Blora dinilai telah tepat waktu mengirimkan laporan hasil penyelenggaraan pemerintahan daerahnya kepada instansi yang ia pimpin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Yang mana sebelum hari ini diumumkan hasil pemeriksaannya," ucap Ayub secara luring di Gedung BPK RI Perwakilan Jateng, Kota Semarang pada Rabu (27/4/2022).

Disampaikannya, pada 2 Maret 2022 lalu telah terlebih dahulu dilakukan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Blora Unaudited Tahun Anggaran 2021 kepada BPK RI Perwakilan Jawa Tengah oleh Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati.

"Selamat untuk Kabupaten Blora. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, hasil pemeriksaan LKPD nya dengan predikat opini WTP. Semoga ke depan bisa dipertahankan dan lebih baik lagi kualitas penyelenggaraan laporan keuangan daerahnya," ujar Ayub.

Diungkapkannya, hasil ini disampaikan setelah dilakukan serangkaian tahapan pemeriksaan LKPD oleh tim BPK.

"Meskipun 2021 kemarin kondisi pandemi begitu menguras tenaga dan kondisi keuangan daerah, namun semuanya mampu dilaksanakan dengan baik dan tidak ada penyimpangan," ungkap Ayub.

Ayub berharap, ada perbaikan terhadap beberapa catatan yang ditemukan, yang sifatnya administratif, guna peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berujung pada kesejahteraan masyarakat.

"Dalam melaksanakan kegiatan di 2022 ini, Pemkab bisa lebih baik lagi. Mengingat tahun ini merupakan tahun kebangkitan ekonomi pasca pandemi yang mulai melandai," imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Blora Arief Rohman, mengucapkan rasa syukurnya, sekaligus bangga dengan raihan Opini WTP kembali kedelapan kalinya.

Bupati berharap, capaian ini bisa terus ditingkatkan dan dipertahankan agar kualitas penyelenggaraan keuangan di Kabupaten Blora bisa lebih baik lagi.

"Alhamdulillah, Kado manis jelang Lebaran. Terimakasih kepada seluruh ASN perangkat daerah yang telah bekerja keras dan terus bersinergi dengan DPRD," ucap Bupati Arief.

"Semoga kerja sama ini ke depan bisa lebih baik lagi. Bukan tentang WTP lagi, tapi tentang peningkatan kualitas LKPD nya," sambungnya.

Menurutnya, dari hasil pemeriksaan LKPD ini, Pemkab Blora memperoleh gambaran yang lebih obyektif mengenai kondisi yang ada tidak hanya dari sisi pengelolaan keuangan saja, tetapi juga dari sisi pelayanan kepada masyarakat.

"Untuk meningkatkan efektifitas, maka sesuai dengan saran dari tim BPK telah disusun sebuah rencana aksi atau tindak lanjut yang mengarah pada penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban," terangnya.

"Rencana aksi tersebut diantaranya pembenahan sistem dan prosedur serta kebijakan yang menjamin adanya pengendalian internal yang memadai dan peningkatan kualitas sumber daya manusia," tambah Bupati.

Lanjut Bupati, dari sisi pertanggungjawaban, action plan akan lebih difokuskan pada penertiban pengelolaan dan pemanfaatan aset tetap.

"Semua upaya perbaikan tersebut tidak hanya dikarenakan adanya tuntutan dari tim BPK semata, namun juga dikarenakan tuntutan masyarakat luas atas kualitas pengelolaan keuangan daerah yang harus semakin transparan," papar Bupati.

Dikatakannya, dengan WTP ini maka Pemkab Blora telah memperoleh Opini WTP 8 kali berturut-turut, tapi tidak berarti pengelolaan keuangan sudah maksimal, masih banyak yang harus diperbaiki dan ditingkatkan,

"Karena pengelolaan keuangan yang baik seharusnya tercermin dari perencanaan yang baik, belanja yang berkualitas dan output yang bermanfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat," jelas Bupati. (kim)